

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan erat hubungannya dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar terciptanya sebuah kesejahteraan. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah selalu dihadapkan dengan masalah kemiskinan, karena kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah lepas dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat. Permasalahan dalam kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena salah satu faktor yang menghambat dalam pembangunan adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan juga memberikan pengaruh terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh karena merupakan sumber untuk masalah sosial lainnya.

Program-program lainnya yang dilaksanakan sejauh ini dalam upaya menangani kemiskinan belum memberikan dampak yang besar sehingga tujuan nasional yang berkaitan dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan secara seksama. Dalam rangka mengakomodasi usaha dan upaya yang terus berkelanjutan ini, pemerintah meluncurkan program khusus yang disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan taraf pendidikan dan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi penerima bantuan PKH (I.P. Pertiwi.dkk, 2020)[1]. Dengan pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM) yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Persyaratan itu dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (A.R.Laisouw.dkk, 2020)[2]. Sehingga mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan social.

Saat ini kemiskinan menjadi masalah yang perlu diatasi di daerah kabupaten Padang-Pariaman, serta kesulitan yang dihadapi salah satunya adalah kesulitan dalam menentukan penerima PKH berdasarkan kriteria yang ada. Karena pada saat ini masih banyak penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai belum tepat sasaran, dimana masih banyak orang yang seharusnya menerima, tapi tidak mendapatkan dana bantuan tersebut. Hal ini karena di dalam penentuan peserta PKH ada beberapa calon peserta yang miskin atau kurang mampu memiliki tingkat kelayakan yang tidak jauh berbeda. Dalam hal ini sistem pendapatan yang menjadi acuan pada umumnya masih menggunakan data lama yang belum mengalami perubahan dan pengolahan data masih secara manual.

Untuk mendukung upaya dalam pemerataan pembagian kesempatan bagi setiap masing-masing calon penerima PKH yang berhak harus didukung dengan suatu sistem dalam mendukung suatu keputusan yang berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan, agar manfaat bantuan ini dapat dirasakan oleh setiap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Untuk itu sistem pendukung keputusan yang dibuat harus mampu memberikan pemecahan masalah dengan

kondisi semi-terstruktur dan tak terstruktur, jadi dapat menyediakan informasi, membimbing, memberi perkiraan dan menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan dengan baik.

Dalam penelitian ini digunakan suatu metode pengambilan keputusan yang disebut *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS). Yang mana metode ini dapat mengoptimalkan penaksiran dalam menentukan nilai terendah dan tertinggi (S.M.Harahap.dkk, 2021)[3]. Metode ini merupakan kombinasi dari pendekatan MCDM yaitu model jumlah tertimbang (*Weighted Sum Model/WSM*) dan model produk tertimbang (*Weight Product Model/WPM*), yang membutuhkan normalisasi linear dari elemen matrik keputusan menggunakan dua persamaan (R.Manurung.dkk, 2020)[4]. Dengan penyeleksian berbagai kriteria yang telah ditentukan dan yang paling sesuai dengan cara pembobotan, sehingga membantu meminimalisir terjadinya salah sasaran dalam proses penyeleksian (S.Humairoh.dkk, 2021)[5]. Metode WASPAS ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam membantu mencari masyarakat yang layak menerima bantuan PKH di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, kab. Padang-Pariaman dengan tepat serta akurat, serta mampu menyelesaikan penilaian terhadap penyeleksian kriteria-kriteria dengan efektif dan efisien.

Dengan penjelasan tersebut, maka judul penelitian yang diusulkan yakni **“Penerapan Metode WASPAS (*Weighted Aggregated Sum Product Assessment*) untuk Menentukan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan”**, dengan objek penelitian yaitu di Nagari Sungai Sirah Kuraji Hulu, Kabupaten Padang-Pariaman.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan beberapa masalah yang timbul :

1. Bagaimana metode WASPAS dapat diterapkan dalam menentukan mana penerima yang layak untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ?
2. Bagaimana proses penentuan kelayakan penerima bantuan PKH menggunakan metode WASPAS dapat dibangun kedalam sebuah sistem penunjang keputusan ?
3. Bagaimana penerapan sistem penunjang keputusan ini dalam menghasilkan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan penerima bantuan PKH ?

1.3 Hipotesa

Dari rumusan masalah yang diketahui, maka disusun hipotesis yang didasarkan pada masalah yang ada, yaitu :

1. Diharapkan dengan Sistem Penunjang Keputusan metode WASPAS ini dapat membantu menentukan penerima yang layak untuk bantuan PKH.
2. Diharapkan Sistem penunjang keputusan yang dibangun dapat menghasilkan informasi yang berguna sesuai dengan kebutuhan.
3. Diharapkan hasil dari sistem yang dirancang memberi jawaban tepat untuk menentukan penerima yang layak untuk program bantuan PKH.

1.4 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian terarah pada persoalan yang dibahas dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka ditetapkan batasan permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai Sistem penunjang keputusan yang dirancang dengan berbasis web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Rancangan sistem yang dibangun disesuaikan dengan penerapan sistem menggunakan metode WASPAS (*Weighted Aggregated Sum Product Assessment*). Sumber data yang digunakan berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh kantor Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu. Kriteria dan syarat pada program bantuan sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, sehingga rancangan yang dibuat akurat sesuai dengan kebutuhan.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini, beberapa maksud dan tujuan yang hendak dicapai dan sesuai dengan harapan, yaitu :

1. Model sistem ini menerapkan metode WASPAS untuk mengurangi kesalahan dan kekeliruan dalam menentukan penerima PKH di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu.
2. Sistem penunjang keputusan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan penerima bantuan PKH yang layak untuk menerimanya.
3. Sistem yang dirancang menggunakan metode WASPAS, menjadi solusi bagi kantor Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu dalam

mengumpulkan informasi untuk mengambil keputusan yang sesuai dari yang dihasilkan oleh sistem.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan masa studi S1, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata serta sebagai dokumentasi atas masalah yang sudah diteliti.

2. Bagi Universitas

Memberikan kontribusi untuk penambahan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pengembangan penulisan dan penelitian.

3. Bagi Objek Penelitian

Dapat menjadi solusi untuk memberikan keputusan yang tepat dalam menentukan penerima yang layak untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di lingkungan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu.

4. Bagi Peneliti yang akan datang

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang serupa.

1.7 Tinjauan Umum

Pada bagian tinjauan umum ini, akan dijelaskan mengenai sejarah singkat Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu dan struktur organisasi yang ada didalamnya.

1.7.1 Sejarah Singkat Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu

Keberadaan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu merupakan pemekaran dari nagari Induk yaitu Nagari Kuranji Hulu semenjak tahun 2011. Penduduk berasal dari kesatuan adat istiadat Nagari Kuranji Hulu Induk.

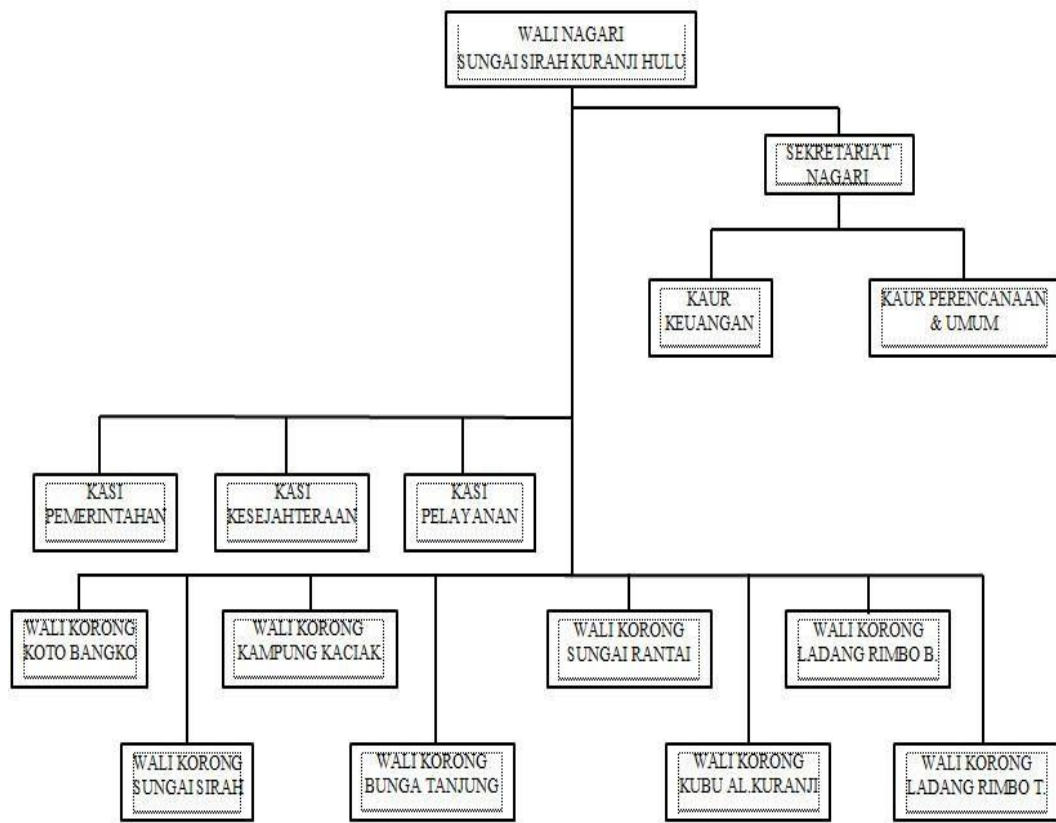
Sejak dari proses pemekaran hingga saat sekarang ini Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu baru dipimpin oleh walinagari yang dipilih langsung oleh masyarakat Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu yaitu Bapak Mahyuni Dt. Kamulie.

Untuk pelaksanaan pemerintahan di tingkat nagari diselenggarakan di kantor Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu yang beralamat di Korong Koto Bangko.

1.7.2 Stuktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masingnya berlangsung seperti yang diharapkan sehingga tujuan dapat tercapai.

Adapun struktur organisasi dari Kantor Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber : Kantor Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu

1.7.3 Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bagian pada struktur organisasi Kantor Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu :

1. Wali Nagari

Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Tugas pokok : Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Nagari.
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat Nagari.
- 6) Membina ekonomi Nagari.
- 7) Mengordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif.
- 8) Mewakili Nagarinya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Nagari

Tugas pokok : Membantu wali nagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi nagari dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah nagari.

Fungsi :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, Pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan dan Umum
- Tugas pokok : Membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Nagari, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- Fungsi :
- 1) Tata naskah.
 - 2) Administrasi surat menyurat.
 - 3) Arsip.

- 4) Ekspedisi.
- 5) Penataan administrasi perangkat Nagari.
- 6) Penyediaan prasarana perangkat dan kantor.
- 7) Penyiapan rapat.
- 8) Pengadmistrasian aset.
- 9) Inventarisasi.
- 10) Perjalanan dinas.
- 11) Pelayanan umum.
- 12) Menyusun APB Nagari.
- 13) Inventarisir data-data pembangunan.
- 14) Monitoring dan evaluasi program.
- 15) Penyusunan laporan.

4. Kepala Urusan (KAUR) Keuangan

Tugas pokok : Membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Nagari, pengelolaan administrasi keuangan Nagari dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari.

Fungsi :

- 1) Administrasi keuangan.
- 2) Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran.
- 3) Verifikasi administrasi keuangan.
- 4) Administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Dan Lembaga Pemerintahan Nagari Lainnya.

5. Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan

Fungsi :

- 1) Tatapraja pemerintahan.
- 2) Menyusun rencana regulasi Nagari.
- 3) Pembinaan masalah pertanahan.
- 4) Pembinaan masalah ketentraman dan ketertiban.
- 5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
- 6) Kependudukan.
- 7) Penataan dan pengelolaan wilayah.
- 8) Pendataan dan pengelolaan profil Nagari.

6. Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan

Fungsi :

- 1) Pembangunan sarana prasarana Nagari.
- 2) Pembangunan bidang pendidikan.
- 3) Pembangunan bidang kesehatan.
- 4) Sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

7. Kepala Seksi (KASI) Pelayanan

Fungsi :

- 1) Melaksanakan penyuluhan
- 2) Motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- 3) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat

- 4) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

8. Wali Korong

Wali Korong berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Fungsi :

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.